



► KAWASAN MALIOBORO

Penataan untuk Menjamin Aspek Legalitas

MANTRIJERON-Pedagang Teras Malioboro (TM) 2 menggelar aksi protes menolak relokasi jilid kedua. Protes dilakukan karena pedagang merasa tak dilibatkan oleh pemerintah dalam perencanaan.

*Afifi Annissa Karin & Yosef Leon Pinsker
redaksi@harianjogja.com*

Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, mengatakan penataan pedagang TM 2 dilakukan untuk memberikan aspek legalitas. "Kalau dulu hanya UMKM, tapi begitu masuk di teras mereka menjadi

► Sugeng mengatakan pro dan kontra akan muncul dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

► Penataan TM2 bukan untuk menurunkan pendapatan pedagang, tetapi justru menjadikannya semakin tertata.

terant," ujar Sugeng saat ditemui sesuai mengisi acara di Hotel Burza, Senin (15/7).

Sugeng mengatakan pro dan kontra akan muncul dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, dia

memastikan tak ada kebijakan pemerintah yang akan merugikan masyarakat.

Penataan TM2 bukan untuk menurunkan pendapatan pedagang, tetapi justru menjadikannya semakin tertata dan mendatangkan lebih banyak pengunjung.

Dijelaskan Sugeng, Kota Jogja khususnya kawasan Malioboro merupakan wajah DIY. Penataan ini juga dilakukan untuk menjadikan kawasan Malioboro tertata, sehingga wisatawan bisa merasakan kenyamanan.

Imbasnya, Malioboro bisa terus menjadi tujuan wisatawan. Di sisi lain, Malioboro merupakan bagian dari Sumbu Filosofi yang harus terus dijaga. "Pemerintah

tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Semua harus saling mendukung, saling berkontribusi menuju Kota Jogja yang tertib, aman, damai, ekonominya tumbuh melalui UMKM, dan filosofisnya bisa dipertahankan," katanya.

Wewenang Pemkot

Sementara, Sekda DIY Beny Suharsono mengatakan penataan dan manajemen TM 2 menjadi kewenangan Pemkot Jogja. Meski demikian, Pemda DIY meminta agar Pemkot terus membangun dialog dengan para pedagang sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan kondusif.

"Kami bukan melempar tanggung

jawab, tapi itu [penataan dan relokasi pedagang] merupakan wewenang Pemkot," katanya, Senin.

Beny menyatakan jajarannya memberikan keleluasan kepada Pemkot untuk mengatur rencana relokasi pedagang jilid kedua. Menurutnya, permintaan pedagang yang minta dilibatkan dalam proses relokasi akan diakomodasi oleh pemerintah. Terlebih, semua kegiatan yang dilaksanakan selalu melibatkan elemen masyarakat. "Dari dulu sudah dilibatkan. Semua elemen sudah dilibatkan melalui perwakilan," katanya.

Sebelumnya, sejumlah pedagang TM 2 menggelar aksi protes, Sabtu (13/7) malam. Aksi protes ini

merupakan buntut dari penolakan pedagang atas rencana relokasi jilid kedua.

Ketua Paguyuban Pedagang Tri Dharma, Aff Usman, menuturkan aksi protes yang dilakukan merupakan imbas dari tuntutan mereka yang tak kunjung didengarkan. Pedagang, menurut Usman, menuntut dilibatkan pada proses relokasi. Sebab, selama ini tak ada keterlibatan pedagang TM 2 dalam rencana relokasi. "Kami minta pemerintah duduk bersama kami, bukan komunikasi satu arah," kata Usman, Minggu (14/7).

Usman mengaku hingga saat ini belum ada kejelasan mendetail soal lokasi relokasi.

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005